

**ANALISIS PROSES PENYUSUNAN RKA-SKPD PADA DINAS
KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Akuntansi (DIII)
sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh :

BAYU PRATAMA
NIM. 1109183/2011

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
PROGRAM DIPLOMA III FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2015

PENGESAHAN TUGAS AKHIR




**ANALISIS PROSES PENYUSUNAN RKA-SKPD PADA DINAS
KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

Nama : Bayu Pratama
NIM : 1109183
Program Studi : Akuntansi (DIII)
Fakultas : Ekonomi

**Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir Program
Studi Akuntansi (DIII) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang**

Padang, Februari 2015

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Nelvirita, SE, M.Si. Ak	(Ketua) 
2. Halkadri Fitra, SE, MM. Ak	(Penguji I) 
3. Friyatmi, S.Pd, M.Pd	(Penguji II) 

ABSTRAK

Bayu Pratama : Analisis Proses Penyusunan RKA-SKPD Pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui proses penyusunan RKA-SKPD dan menganalisis penerapan anggaran berbasis kinerja dalam proses penyusunan RKA-SKPD yang sudah diterapkan di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Bentuk penelitian tugas akhir ini adalah deskriptif yaitu dengan mengumpulkan data penelitian tentang analisis proses penyusunan RKA-SKPD pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan data yang diperoleh, peneliti melakukan pengolahan data sehingga akhirnya diperoleh hasil. Berdasarkan hasil yang diperoleh tersebut peneliti dapat memberikan kesimpulan tentang analisis dan permasalahan dalam proses penyusunan RKA-SKPD pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa dalam proses penyusunan RKA-SKPD pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sudah sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dimana sudah mengikuti Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD) dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam menerapkan penganggaran berbasis kinerja atas program dan kegiatan belum sepenuhnya menerapkan penganggaran berbasis kinerja.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Tugas Akhir ini. Sebagai judul Tugas Akhir yaitu **”Analisis Proses Penyusunan RKA-SKPD Pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat”**.

Tugas Akhir ini merupakan prasyarat yang harus dipenuhi sebagai pelengkap mata kuliah dan untuk dapat menyelesaikan program studi Diploma III pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan tugas akhir ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan dan bantuan baik moril maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dekan beserta Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Koordinator dan Sekretaris program studi Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Ibu Vita Fitria Sari, SE, M.Si selaku pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan arahan, bimbingan, saran serta nasehat dalam berbagai hal terutama dalam penyusunan Tugas Akhir ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir.

4. Ibu Nelvirita, SE, M.Si. Ak selaku pembimbing pengganti dalam ujian Tugas Akhir yang telah membantu dan memberi nasehat sehingga penulis dapat menyelesaikan Ujian Tugas Akhir sesuai dengan waktu yang ditentukan.
5. Bapak dan Ibu dosen, Staf pengajar dan Karyawan program studi Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
6. Teristimewa penulis ucapkan kepada ayahanda tercinta dan ibunda tersayang yang telah berkorban baik materil maupun moril, memberikan motivasi super dan mendoakan penulis demi terwujudnya cita-cita penulis.
7. Tersayang Tesa Widy Astuti yang selalu memberikan motivasi lebih agar penulis mampu menjalankan semua kegiatan yang penulis lakukan.
8. Rekan-rekan mahasiswa program studi Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang khususnya Akuntansi DIII.
9. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir yang tidak dapat penulis disebutkan satu persatu.

Penulis berharap agar Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca lainnya, terutama bagi penulis sendiri.

Padang, Februari 2015



Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Anggaran.....	7
B. Perencanaan Tujuan dan Sasaran	13
C. Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja SKPD	14
D. Anggaran Berbasis Kinerja.....	20
BAB III PENDEKATAN PENELITIAN	
A. Bentuk Pendekatan Penelitian.....	27
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	27
C. Rancangan Penelitian.....	28
BAB IV PEMBAHASAN DAN TEMUAN	
A. Gambaran Umum Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat	32
1. Sejarah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat	32
2. Visi dan Misi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.....	33
3. Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.....	34
B. Temuan dan Pembahasan.....	38
1. Temuan	38
a. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD.....	38
b. Proses Penyusunan RKA-SKPD.....	40
c. Analisis Penyusunan RKA-SKPD	44

d. Anggaran Berbasis Kinerja dalam Proses Penyusunan RKA-SKPD	45
2. Pembahasan.....	46
a. Proses Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.....	46
b. Anggaran berbasis kinerja dalam proses penyusunan RKA-SKPD pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.....	50
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	52
B. Saran	52

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Proses Penyusunan RKA-SKPD	18
2. Bagan Alir Pengerjaan RKA-SKPD	19
3. Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat	37
4. Pedoman Penyusunan RKA-SKPD	39
5. Penyusunan Anggaran (RKA-SKPD)	40
6. Penyusunan RKA-SKPD	42

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Observasi.
2. DPA-SKPD Tahun 2011 Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
3. DPA-SKPD Tahun 2012 Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
4. DPA-SKPD Tahun 2013 Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
5. DPA-SKPD Tahun 2014 Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
6. Standar Operasional Prosedur (SOP) Rencana Kerja dan Anggaran Sub Bagian Program Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era keterbukaan ini, masyarakat semakin menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan lebih dapat menyampaikan aspirasi yang berkembang yang salah satunya perbaikan terhadap sistem pengelolaan keuangan pada badan-badan pemerintah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bagian yang mengalami perubahan mendasar dengan undang-undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-undang tersebut telah memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah. Dalam sistem pemerintah semakin meningkat pada era keterbukaan saat ini, tidak terkecuali transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah atas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pemerintahan daerah dalam pengelolaan keuangan yang menjadi kewenangannya membutuhkan dana, dan dana tersebut bersumber dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran dan dalam pengelolaan keuangan negara. Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Pasal 19 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa, dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Pada pemerintahan saat ini diterapkan anggaran berbasis kinerja dimana anggaran yang memakai sistem anggaran tradisional yang terkesan kaku, birokratis, dan hirarkis serta menunjukkan hubungan antara tingkat pendanaan program dan hasil yang diinginkan dari program tersebut.

Dalam Pemendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 1 ayat (6) menyebutkan bahwa, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Penyelenggaraan pemerintahan atas penggunaan keuangan harus secara efektif dan efisien, dengan adanya perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, maka dana yang akan dialokasikan ke daerah dapat digunakan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dan pengembangan daerah menjadi lebih baik. Perimbangan dana antara pusat dan daerah dalam alokasi kebutuhan dana, pemerintahan daerah dapat menentukan kebutuhan dana berdasarkan beban pengeluaran masing-masing tingkat pemerintahan di daerah. Sedangkan perencanaan kebutuhan keuangan pemerintah merupakan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap

program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk satu tahun anggaran. Penggunaan dana atas pelaksanaan program dan kegiatan oleh pemerintahan berdasarkan perencanaan yang telah dirancang.

Menurut Freeman (2003) yang dikutip oleh Nordiawan (2006 : 48) “Anggaran adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya ke dalam kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas (*the process of allocation resources to unlimited demands*)”.

Penganggaran sektor publik dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program aktivitas ditetapkan dalam satuan moneter. Proses penganggaran organisasi sektor publik dimulai dari penyusunan strategi dan perencanaan strategik yang telah selesai dilakukan. Anggaran pemerintah daerah, dalam penyusunannya menerapkan partisipasi satuan kerja dilingkungan pemerintahannya dengan membuat dan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran oleh setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang disebut dengan RKA-SKPD. Dalam penyusunan RKA-SKPD masing-masing satuan kerja membuat indikator kinerja sebagai sasaran anggarannya. Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja, dapat mengagalkan perencanaan yang telah disusun.

Dalam Pemandagri Nomor 13 Tahun 2006 menjelaskan mekanisme penyusunan anggaran tahunan dan proses penjarangan informasi pada dasarnya merupakan bagian dari upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis daerah. Dalam proses ini Kebijakan

Umum Anggaran (KUA) menjadi payung bagi eksekutif khususnya unit kerja dalam menyusun kebijakan anggaran tahunan. Dalam penyusunan rencana kerja masing-masing program harus sudah memuat secara lebih rinci uraian mengenai nama program, input, proses, output, *benefit*, dan *impact* yang akan dicapai. Seluruh program yang telah dirancang oleh masing-masing unit kerja, selanjutnya diserahkan ke Panitia Anggaran Eksekutif. Panitia Anggaran Eksekutif selanjutnya menganalisis dan bila perlu menyeleksi program-program yang akan dijadikan rencana kerja dimasing-masing unit kerja berdasarkan program kerja yang masuk ke Panitia Anggaran Eksekutif, yang kemudian dijadikan dasar untuk menyusun dan merancang *draft* Kebijakan Pembangunan dan Kebijakan Anggaran Tahunan yang nantinya akan dibahas dengan pihak DPRD.

Pada saat ini, melihat gambaran kenyataan yang ada penerapan anggaran kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, dirasakan masih belum optimal. Pada beberapa sisi, khusus program dan kegiatan dari SKPD, masih sangat dipengaruhi oleh program dan kegiatan yang telah dikerjakan pada tahun-tahun sebelumnya, kurang adanya perubahan pada program dan kegiatan untuk tahun berikutnya. Demikian pula dengan penentuan besarnya anggaran belum sepenuhnya mengacu pada target kinerja berupa *output* dan *outcome*. Dana yang dianggarkan pada program dan kegiatan masih belum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang berbasis kinerja. Kondisi demikian merupakan salah satu daya tarik untuk diteliti lebih jauh. Bagaimana

dan sejauh apa yang bisa dilihat dari penerapan sistem anggaran kinerja pada pemerintah.

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sebagai dinas pelayanan dan lembaga teknis daerah serta perumusan kebijakan penyusunan program kerja pengawasan dan pengendalian berusaha menyesuaikan terhadap perubahan kondisi dan perkembangan terhadap kebijakan maupun peraturan yang terkait dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran baik dalam melakukan aktifitas maupun pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah dibebankan pada masing-masing unit kerjanya.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas permasalahan tersebut lebih lanjut dan menjadikannya sebagai dasar pemikiran penulis dalam bentuk Tugas Akhir. Adapun judul Tugas Akhir yang akan penulis bahas adalah . **“Analisis Proses Penyusunan RKA-SKPD Pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah yaitu :

1. Bagaimana proses penyusunan RKA-SKPD pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat?
2. Apakah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat telah menerapkan anggaran berbasis kinerja dalam proses penyusunan RKA-SKPD?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian oleh penulis adalah :

1. Untuk menganalisis bagaimana langkah-langkah penyusunan RKA-SKPD oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk menganalisis apakah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat telah menerapkan anggaran berbasis kinerja dalam proses penyusunan RKA-SKPD.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait, yaitu:

1. Bagi penulis, penelitian ini untuk menganalisis bagaimana proses penyusunan RKA-SKPD pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
2. Bagi Instansi, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam menerapkan anggaran berbasis kinerja pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
3. Bagi pembaca, selain sebagai bahan bacaan semoga karya ilmiah atau Tugas akhir ini dapat menjadi wahana transformasi pengetahuan bagi masyarakat atau para pembaca di jenjang diploma tiga (D3) dalam memahami analisis proses penyusunan RKA-SKPD.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses dan langkah-langkah dalam Penyusunan RKA-SKPD oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat telah sesuai dengan ketentuan Permendagri No.13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, dimana RKA disusun berdasarkan KUA dan PPA yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan DPRD serta program dan kegiatan mengikuti Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD) hanya saja dalam penyusunan RKA-SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tidak diawali dengan rincian anggaran pendapatan SKPD.
2. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam penerapan penganggaran berbasis kinerja atas program dan kegiatan belum sepenuhnya menerapkan penganggaran berbasis kinerja, hal ini dilihat dari penyusunan rencana kerja anggaran yang masih menggunakan program dan kegiatan tahun sebelumnya.

B. Saran

Dari kesimpulan, maka yang dapat dilakukan untuk perbaikan kinerja dimasa akan datang yaitu :

1. Melakukan perbaikan sasaran dengan cara menentukan dan menetapkan dana/anggaran yang relevan antar program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD sehingga dana/anggaran dapat lebih menggambarkan hasil terhadap program dan kegiatan.

2. Kiranya penelitian ini dapat menjadi bahan acuan bagi peneliti selanjutnya, agar dapat meneliti anggaran berbasis kinerja dalam proses penyusunan RKA-SKPD secara lebih rinci. Sehingga akan selalu ada perubahan kearah yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto. 2005. *Metodologi Penelitian*. Jakarta.
- Bastian, Indra. 2006. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Donald R Cooper. 2006. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta.
- Kusworo. 2010. *Profil Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat*. Padang.
- Mardiasmo. 2005. *Akuntansi Sektor Publik : Penentuan Harga Pelayanan Publik*. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi.
- Mulyadi. 2001. *Sistem Akuntansi*. Edisi ketiga jilid 4. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Nordiawan. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat.
- Nordiawan. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat.
- Nordiawan. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat.
- Rudianto. 2009. *Penganggaran*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Suharismi. 2005. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta.
- Peraturann Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006
Tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- <http://www.scribd.com/doc/122917214/Tata-Cara-Penyusunan-RKA-SKPD> akses tanggal 22 Nov 2014 pukul 20.45
- <http://dppka.jogjaprov.go.id/document/b.Paparan-Teknis-Penyusunan-RKA-SKPD.pdf> akses tanggal 29 Nov 2014 pukul 20.30